

# **PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN LABA BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH: ANALISIS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN PERIODE 2019-2022**

Susi, Susi<sup>1</sup>. Widyanti, Yeni<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Bina Darma, <sup>2</sup> Universitas Bina Darma

<sup>1</sup> 20152006P@student.binadarma.ac.id

## **Abstrak**

Selain transfer dana dari pemerintah pusat, daerah dituntut untuk mandiri mencari sumber pendapatan untuk mengelola daerah masing-masing. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD secara parsial maupun simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Sumatera Selatan periode 2019-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel yang diuji 68 yaitu data 4 tahun dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data diperoleh secara *purposive sampling*. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan *software SPSS*. Hasil penelitian ini adalah secara simultan ketiga variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Sedangkan secara parsial variabel pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD, variabel retribusi daerah, dan variabel laba BUMD memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap PAD.

Kata kunci : Penerimaan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD,

## **PENDAHULUAN**

Sistem desentralisasi di Indonesia memberikan hak dan wewenang kepada daerah untuk mengatur tata kelola daerah secara mandiri (Christia & Ispriyarso, 2019; Guntoro, 2021). Salah satu hak dan wewenang tersebut adalah menetapkan, mengatur, mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan pembangunan daerah masing-masing. Melalui APBD, masing-masing daerah bisa mengatur prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan daerah untuk memiliki sumber pendapatan yang disebut sebagai pendapatan asli daerah (PAD)(Wulandari & Kaartika, 2021). Sumber pendapatan suatu daerah diperoleh dari (1) dana transfer dari pemerintah pusat, (2) pendapatan asli daerah, dan (3) pendapatan lain daerah yang sah. Hal ini diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal Pasal 285 berbunyi “(1)

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas: (a) pendapatan asli Daerah meliputi: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; (b) pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah adalah sumber penerimaan yang diperoleh daerah atas hasil usaha masing-masing daerah. Penerimaan yang dimaksud adalah penerimaan daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hernimawati et al., 2018). Semakin besar PAD suatu daerah, maka semakin besar pula anggaran yang bisa dikelola dan dibelanjakan oleh daerah tersebut. Harapan dengan memiliki anggaran besar yang bisa dibelanjakan adalah bisa mengembangkan potensi-potensi lain yang dimiliki oleh daerah sehingga bisa menggerakkan ekonomi daerah menjadi lebih baik. Selain itu, menjadi sumber baru pendapatan daerah melalui unit usaha daerah yang baru.

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari kekayaan daerah itu sendiri, dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan belanja daerah dan diatur dengan peraturan daerah.. PAD menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah. Optimalisasi PAD bisa terwujud jika daerah bisa mengolah semua potensi sumber daya yang dimiliki, disertai dengan tata kelola yang baik. PAD suatu daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah, dan pendapatan lain yang sah (Hernimawati et al., 2018). Jika daerah mampu memaksimalkan pendapatan dari ketiga sumber tersebut, maka daerah tersebut akan memiliki PAD yang besar.

### **Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Salma, 2021; Sihombing & Alestria, 2020). Perhitungan pajak lamanya dihitung berdasarkan 1 tahun kalender (Costa, 2020). Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota adalah: (a) pajak hotel (b) pajak restaurant (c) pajak hiburan (d) pajak reklame (e) pajak penerangan jalan, (f) pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) (f) pajak parkir (g) pajak sarang burung walet (h) pajak air tanah (i) BPHTB, dan (j) PBB pedesaan dan perkotaan (Purnama, 2020).

.Sektor pajak merupakan salah satu andalan suatu daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Realisasi penerimaan pajak bisa mempengaruhi kebijakan fiskal yang akan dikeluarkan (Christia & Ispriyarso, 2019; Jia et al., 2020). Daerah yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi memiliki kesempatan yang tinggi pula dalam pendapatan pajak. Sebab semakin besar juga jumlah orang atau lembaga yang tergolong wajib pajak (Nababan & Putra, 2018). Oleh sebab itu, daerah perkotaan cenderung pendapatan pajaknya lebih besar dengan daerah atau kabupaten yang jumlah penduduknya kecil. Di daerah perkotaan, bisa memaksimalkan dari pajak hotel, restoran, dan pajak hiburan karena hotel-hotel biasa berdiri di daerah yang padat penduduk . Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah rasio kepatuhan wajib pajak yang membayar pajak daerah. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak, semakin besar juga pendapatan daerah tersebut dari sektor pajak (Gultom, 2019; Ismanura, d, 2019). Dengan asumsi demikian, artinya pajak memiliki pengaruh terhadap PAD.

### **Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya(Nurhajizah & Tipa, 2021). Sumber retribusi daerah dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu retribusi umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi jasa usaha daerah(Nurcholis, 2017). Adapun jenis-jenis jasa umum terdiri dari: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, (2) Retribusi Palayanan Persampahan/ Kebersihan, (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, (5) Retribusi Pelayanan Pasar, (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, (7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, (8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dan (9) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. Sedangkan jenis-jenis dari Retribusi Jasa Usaha terdiri dari: (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, (2) Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan, (3) Retribusi Tempat Pelelangan, (4) Retribusi Terminal, (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir, (6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggaan/ Villa, (7) Retribusi Penyedotan Kakus, (8) Retribusi Rumah Potong Hewan, (9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, (10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, (11) Retribusi Penyebrangan di Atas Air, (12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dan (13) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah. Jenis ketiga adalah jenis Retribusi Perizinan

Tertentu yaitu terdiri dari: (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, (2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, (3) Retribusi Izin Gangguan, dan (4) Retribusi Izin Trayek.

### **Laba BUMD**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah merupakan unit usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang tujuannya adalah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Modal BUMD berasal dari belanja penyertaan modal yang dikeluarkan oleh daerah. Modal yang disertakan diharapkan menjadi laba. Laba inilah yang masuk ke kas daerah sebagai laba BUMD (Heriasman & Suwaji, 2021). Biasanya unit usaha yang dikelola oleh BUMD adalah sektor strategis yang sifatnya adalah kepentingan hajat orang banyak. Contohnya adalah bank daerah, pengelolaan air bersih, jasa konstruksi skala daerah, perusahaan tambang, dan lain sebagainya. Suatu unit BUMD jika memperoleh laba yang besar maka memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu menambah PAD, mengurangi beban anggaran daerah karena beban anggaran berupa suntikan modal untuk unit BUMD tersebut bisa dialihkan untuk belanja lain.

Provinsi di Sumatera Selatan terdiri dari 17 kabupaten/kota. Masing-masing daerah memiliki PAD yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD. Besaran PAD tiap-tiap daerah di lingkungan provinsi Sumatera Selatan juga beragam. Hal ini disebabkan kekayaan daerah juga beragam. Kekayaan yang dimaksud adalah kekayaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, baik bumi, air dan udara yang bisa dimanfaatkan sebagai potensi sumber pendapatan daerah. Daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam bisa memperoleh pendapatan yang besar pada sektor pajak pertambangan, retribusi atas jasa pertambangan, serta laba dari usaha daerah dalam mengelola sumber daya alam tersebut.

Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD terhadap PAD daerah-daerah di provinsi Sumatera Selatan. Novelty dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh adalah data terbaru perolehan pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD, serta PAD daerah-daerah di sumsel tahun 2019-2022.

### **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Objek dari penelitian ini adalah pengaruh penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD serta Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2022. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Data diperoleh dari BPS sumsel. Data sampel yang diuji bisa dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Data tabulasi realisasi pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan PAD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2022

Kabupaten/ Kota	Tahun	Pajak	Retribusi	Laba BUMD	PAD	Kabupaten/ Kota	Pajak	Retribusi	Laba BUMD	PAD
		(Dalam Milyar Rupiah)					(Dalam Milyar Rupiah)			
Kab. Banyuasin	2019	127.73	9.36	5.41	253.09	Kab. Ogan Komeri ng Ulu	45.38	2.80	3.13	145.56
	2020	123.98	10.59	6.43	228.46		44.32	2.21	3.36	115.93
	2021	139.36	7.87	7.84	202.82		50.29	2.01	4.50	102.68
	2022	158.83	11.20	8.56	200.62		54.22	2.18	5.05	119.59
Kab. Empat Lawang	2019	10.91	0.57	5.29	41.67	Kab. Oku Selatan	17.48	9.34	4.24	57.67
	2020	8.10	0.59	6.30	33.74		14.51	12.15	4.91	46.95
	2021	8.67	0.63	7.28	27.85		16.05	6.42	5.88	60.80
	2022	9.73	0.47	8.26	64.77		10.24	0.67	6.42	33.69
Kabupaten Lahat	2019	47.33	4.26	7.07	141.16	Kab. Oku Timur	36.22	13.13	2.32	99.02
	2020	43.32	3.04	7.58	127.99		51.03	5.98	2.81	93.31
	2021	47.44	5.53	8.41	155.36		37.70	2.14	3.47	125.32
	2022	46.24	5.49	9.35	145.78		42.08	1.59	4.56	97.28
Kab. Muara Enim	2019	139.78	8.41	18.46	303.40	Kabupaten PALI	18.73	1.07	1.18	65.10
	2020	81.43	7.85	19.19	248.53		12.15	0.95	1.26	67.91
	2021	83.46	7.60	11.22	240.47		18.59	1.28	1.40	49.47
	2022	30.21	2.22	33.94	122.00		20.12	1.32	1.53	84.79
Kab. Musi Banyuasin	2019	69.94	6.81	14.60	286.59	Kota Lubuk Linggau	41.20	3.95	1.87	100.95
	2020	79.22	12.20	15.21	353.99		36.40	3.19	2.01	86.32
	2021	79.32	8.03	17.34	377.35		39.06	5.21	2.23	128.30
	2022	92.13	4.92	19.07	352.50		37.16	4.42	2.44	49.42
Kab. Musi Rawas	2019	35.58	5.08	5.27	128.56	Kota Pagar Alam	8.44	3.22	5.38	841.14
	2020	83.59	2.87	5.68	169.76		19.90	2.66	5.89	856.67
	2021	43.43	3.50	6.31	169.80		8.45	3.79	6.68	753.11
	2022	41.10	2.66	6.89	138.98		9.92	4.61	7.30	875.41
Kab. Musi Rawas Utara	2019	12.08	0.84	0.12	37.57	Kota Palembang	832.06	47.17	63.55	1,081.11
	2020	23.07	0.69	0.76	47.92		787.92	35.53	64.55	1,032.72
	2021	8.00	0.51	1.40	47.95		838.14	37.22	96.39	1,158.87
	2022	12.13	0.41	1.53	24.66		968.90	31.96	12.13	1,130.78
Kabupaten Ogan Ilir	2019	40.82	6.58	3.40	86.15	Kota Prabumulih	30.19	3.74	1.76	100.98
	2020	51.03	5.98	3.96	87.28		28.49	2.80	2.07	85.04
	2021	58.83	2.73	4.47	108.96		33.21	4.33	2.72	80.78
	2022	75.95	2.56	8.56	253.09		0.35	1.97	2.98	837.11
Kab. Ogan Komeri ng Ilir	2019	62.97	5.40	8.01	195.40					
	2020	60.07	5.01	8.71	168.78					
	2021	65.78	4.48	9.67	156.74					
	2022	86.16	9.38	10.57	193.70					

Dari tabel 1 diperoleh jumlah sampel uji adalah 68, yaitu dokumentasi catatan perolehan pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan PAD selama empat tahun dari 2019 sampai 2022 dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berkas dokumentasi berupa hasil penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD kemudin dikaji dan dianalisis pengaruhnya terhadap PAD. Data dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda yaitu mencari signifikansi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD terhadap PAD di wilayah provinsi Sumatera Selatan. Analisis menggunakan bantuan aplikasi SPSS 23. Variabel terikat X1 adalah pajak daerah, X2 adalah retribusi daerah, dan X3 adalah laba BUMD. Sedangkan variabel bebas Y adalah PAD.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas Data

		X1_Pajak	X2_Retribusi	X3_Laba	Y_PAD
N		69	68	68	68
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	1.0817	1.0207	1.0268	1.0803
	Std. Deviation	.02222	.01701	.01692	.01615
Most Extreme Differences	Absolute	.106	.071	.106	.096
	Positive	.080	.058	.106	.096
	Negative	-.106	-.071	-.074	-.080
Test Statistic		.106	.071	.106	.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054 <sup>c</sup>	.200 <sup>c,d</sup>	.057 <sup>c</sup>	.193 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov variabel X1, X2, X3, dan variabel Y memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Ini menunjukkan data variabel bebas pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta variabel terikat PAD berdistribusi normal. Dengan demikian data tersebut sudah layak untuk dilakukan pengujian analisis regresi. Data berdistribusi normal merupakan salah satu syarat agar data yang dimiliki dalam penelitian ini bisa diuji ke tahap analisis regresi.

### Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

		Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics		
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	103.113	31.093		3.316	.002		
	Pajak	.755	.321	.516	2.352	.022	.129	7.722
	Retribusi	3.739	7.637	.113	.490	.626	.117	8.563
	Laba	3.383	2.496	.183	1.355	.180	.342	2.923

a. Dependent Variable: PAD

Dari tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* variabel pajak adalah 0.129. Nilai *tolerance* variabel retribusi daerah adalah 0,117. Nilai *tolerance* variabel laba BUMD adalah 0,342. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1. Nilai tersebut berarti tidak ada gejala multikolinearitas yang terjadi antar variabel bebas. Begitu juga dengan nilai VIF di

mana nilai masing-masing variabel yaitu nilai VIF pajak 7,722. Nilai VIF variabel retribusi daerah 8,563, dan nilai VIF laba BUMD adalah 2,923. Nilai tersebut di bawah 10. Dengan demikian nilai tolerance dan nilai VIF menunjukkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas yang terjadi antar variabel bebas.

## Uji Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Durbin-Watson

Model Summary <sup>b</sup>										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.776 <sup>a</sup>	.602	.583	185.19841	.602	32.210	3	64	.000	2.014

a. Predictors: (Constant), Laba, Retribusi, Pajak

b. Dependent Variable: PAD

Pada tabel 4 di atas diketahui nilai Durbin-Watson adalah 2,014. Tabel Durbin-Watson untuk  $k = 3$  dan  $n = 68$  dengan  $\alpha = 5\%$  adalah  $du = 1,7001$ . Jika  $DU < DW < 4 - DU$  maka tidak ada gejala autokorelasi. Nilai dari  $4 - DU = 2,299$ . Sehingga nilai DW tersebut memenuhi syarat  $1,7001 < 2,014 < 2,299$ . Dengan demikian tidak ada gejala autokorelasi pada persamaan regresi yang terbentuk.

## Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil uji heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	100.449	25.939		3.873	.000
Pajak	-.171	.268	-.220	-.638	.526
Retribusi	2.039	6.371	.116	.320	.750
Laba	-.010	2.082	-.001	-.005	.996

a. Dependent Variable: RES2

Dari tabel 5 di atas diperoleh nilai signifikansi uji Glejser variabel pajak adalah 0,526. Nilai signifikansi variabel retribusi adalah 0,750. Nilai signifikansi variabel laba BUMD adalah 0,996.

Masing-masing nilai signifikansi variabel bebas tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### Uji Parsial (Uji T)

Tabel 6. Hasil uji t (uji parsial)

Coefficients <sup>a</sup>								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
(Constant)	103.113	31.093		3.316	.002			
1 Pajak	.755	.321	.516	2.352	.022	.764	.282	.186
Retribusi	3.739	7.637	.113	.490	.626	.741	.061	.039
Laba	3.383	2.496	.183	1.355	.180	.678	.167	.107

a. Dependent Variable: PAD

Dari tabel 6 di atas, diperoleh nilai signifikansi masing-masing variabel independen. Nilai signifikansi variabel pajak daerah adalah 0,22. Nilai ini di bawah 0,05. Hal ini berarti variabel pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Variabel retribusi memiliki nilai signifikansi 0,626. Nilai ini di atas 0,05, artinya variabel retribusi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel PAD. Sedangkan variabel laba BUMD memiliki nilai signifikan 0,180. Nilai ini jika dibandingkan dengan nilai batas signifikansi 0,05 berarti lebih besar. Artinya variabel laba BUMD memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel PAD. Dari tabel 6 juga kita bisa membuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$PAD = 103,113 + 0,755X_1 + 3,739 X_2 + 3,383 X_3 + e$$

### Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7 Hasil uji simultan (uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3314212.770	3	1104737.590	32.210	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2195100.912	64	34298.452		
	Total	5509313.683	67			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Laba, Pajak, Retribusi



Hasil uji F pada tabel 7 di atas menunjukkan nilai signifikansi 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05. Artinya secara keseluruhan atau secara simultan variabel pajak daerah, retribusi, dan laba BUMD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel PAD.

Tabel 8. Koefisien determinasi variabel pajak, retribusi, dan laba BUMD terhadap PAD

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.776 <sup>a</sup>	.602	.583	185.19841

a. Predictors: (Constant), Laba, Pajak, Retribusi

Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas secara bersamaan dapat dilihat pada tabel 8 di atas. Diketahui nilai R-square adalah 0,602. Nilai ini menunjukkan bahwa besar kontribusi atau pengaruh dari variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD secara bersama-sama terhadap variabel PAD adalah 60,20%. Nilai ini termasuk ke dalam kategori kuat. Sementara kontribusi lain yang memberikan pengaruh sebesar 39,80% dijelaskan oleh variabel lainnya.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil uji F diperoleh bahwa secara bersamaan variabel pajak, retribusi dan laba BUMD kabupaten/kota di sumsel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD daerah kabupaten/kota di sumsel. Secara inferensial, besarnya pengaruh ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu 60,2%. Nilai persentase tersebut termasuk dalam kategori kuat. Meskipun begitu, masih ada pengaruh dari variabel lain diluar variabel yang diteliti yaitu sebesar 39,8%.

Sumber PAD suatu daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan sumber kekayaan atau dalam bentuk laba BUMD, serta sumber pendapatan lain yang sah. Artinya pengaruh di luar dari variabel pajak, retribusi daerah, dan laba BUMD yaitu sebesar 38,8% bisa

saja berasal dari pendapatan dari sumber lain yang sah. Meskipun demikian, ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang kuat.

Dari hasil uji-t juga diketahui bahwa secara parsial ketiga variabel independen pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Sedangkan variabel retribusi daerah, dan laba BUMD memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap PAD. Jika kita lihat pada data sampel hal ini dianggap sesuai karena nilai retribusi dan laba BUMD sangat kecil dibandingkan dengan PAD. Penelitian dari (Anggraini et al., 2017; Gultom, 2019; Nababan & Putra, 2018) juga menyatakan bahwa variabel pajak, retribusi, dan laba BUMD memiliki pengaruh signifikansi yang berbeda. Dari ketiga variabel independen, semua memiliki nilai koefisien yang positif. Ini berarti ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang searah. Jika terdapat kenaikan pada variabel bebas, baik variabel pajak, retribusi daerah, dan laba BUMD baik salah satunya atau semua, maka variabel terikat yaitu PAD juga mengalami peningkatan. Hasil ini juga sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh

Jika kita memperhatikan data, PAD masing-masing daerah berbeda. Hal ini karena setiap daerah memiliki potensi yang berbeda dengan daerah lain. Ada daerah yang mengoptimalkan penghasilan dari sektor pajak untuk meningkatkan PAD. Ada juga daerah yang beruntung memiliki kekayaan alam yang melimpah, sehingga pengelolaan kekayaan daerah menjadi andalan untuk memperoleh PAD yang banyak melalui sektor retribusi maupun laba BUMD.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut. (1) Secara parsial, variabel pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Sedangkan variabel retribusi daerah dan variabel laba BUMD memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di Sumatera Selatan. (2) Secara simultan variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. (3) Besar pengaruh secara

keseluruhan variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD terhadap PAD daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan adalah 60,2%. (4) Nilai koefisien masing-masing variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD memiliki nilai yang positif terhadap PAD daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan, artinya pengaruh tiap-tiap variabel bersifat searah. Jika terjadi kenaikan pada tiap-tiap variabel, maka nilai PAD juga meningkat, dan begitu juga sebaliknya.

## REFRENSI

- Anggraini, V., Hidayati, K., & Lestari, T. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil Laba Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(3).
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1). <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Costa, A. E. Da. (2020). Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Palopo. *Unversitas Muhammadiyah PALOPO*, 32.
- Gultom, A. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *Riset Manajemen*, 2.
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. *CENDEKIA Jaya*, 3(2). <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>
- Heriasman, H., & Suwaji, S. (2021). Efektifitas dan Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hulu. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(1). <https://doi.org/10.37403/sultanist.v9i1.245>
- Hernimawati, Prihati, Dailiati, S., & Saputra, T. (2018). Rising Pendapatan Asli Daerah (PAD) in Pekanbaru: Billboard Planning Policy Tax. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 156(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/156/1/012032>
- Ismanura, Kalsum, Susyanti, Jeni, Salim, A. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *Riset Manajemen*.
- Jia, J., Ding, S., & Liu, Y. (2020). Decentralization, incentives, and local tax enforcement. *Journal of Urban Economics*, 115. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2019.103225>
- Nababan, D., & Putra, I. G. S. (2018). Analysis contribution and effectiveness of local taxes toward original regional income at Bandung City. *International Journal of Engineering and Technology(UAE)*, 7(4.34 Special Issue 34), 204–207. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.34.23889>
- Nurcholis, H. (2017). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. In *PT Grasindo*.
- Nurhajizah, Y. F., & Tipa, H. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam. *Jurnal Ekobistek*. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i4.217>

- Purnama, S. (2020). Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Salma. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Madiun Periode 2014-2019. In *Akuntansi*.
- Sihombing, S., & Alestiana, S. (2020). Perpajakan Teori dan Aplikasi. In *Widina* (Vol. 44, Issue 8).
- Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(2).

